

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO**

**Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>**

**Politeknik Negeri Jember<sup>1,2</sup>**

**[adetiyaindr@gmail.com](mailto:adetiyaindr@gmail.com)<sup>1</sup>, [arisona\\_ahmad@polije.ac.id](mailto:arisona_ahmad@polije.ac.id)<sup>2</sup>**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine the impact of the financial reports of the regional government of Ponorogo Regency. These factors include the implementing government accounting standards', the government's internal control system, and the use of information technology. This study uses quantitative methods with research instruments using questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the IBM SPSS Statistics 26 application. The results of this study indicate that the three factors, namely the application of government accounting standards, internal government control systems, and the use of information technology have a significant effect on the quality of the financial reports of the regional government of Ponorogo Regency.*

***Keywords: Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, Information Technology Utilization, Local Government Financial Report Quality.***

**PENDAHULUAN**

Keuangan pada organisasi sektor publik menjadi sebuah fakta baru dalam menuntut dilakukannya pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Laporan keuangan pada organisasi sektor publik masuk dalam faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas. Laporan tersebut berperan penting untuk kelangsungan hidup pemerintah, dimana laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban, alat pengendalian dan alat pengambilan keputusan mengenai evaluasi kinerja selama

periode tersebut (Mardiasmo, 2010). Laporan keuangan yang berkualitas ialah informasi pelaporan yang disampaikan sesuai standar dalam peraturan yang berlaku. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan indikator kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan keuangan yang berkualitas juga bisa dilihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal. Untuk menegaskan bahwa laporan telah tersajikan secara wajar dan sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku, maka dilakukan pemeriksaan. Salah satu tanda membaiknya pengelolaan keuangan daerah adalah tingginya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Ponorogo ialah kabupaten yang sudah delapan kalinya meraih opini WTP. Hal ini dikutip dari [jatim.bpk.id](http://jatim.bpk.id), (2020) dan Hasil Ikhtisar Pemeriksaan Semester I (IHPS, 2021) atas hasil opini kualitas laporan keuangan dari BPK sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan dan menyajikan informasi secara akurat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansinya dalam mengelola keuangan, pemerintah daerah dapat menyajikan LKPD secara wajar, telah memenuhi kriteria kualitatif dan sesuai prinsip dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, selaku pihak yang bertugas untuk memeriksa tata kelola dan bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang menampung hal tersebut. Dalam hal ini, sudah ada standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan dalam konteks pemerintahan. Standar tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP harus diikuti sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia yang mencakup persyaratan hukum. Kualitas pelaporan keuangan akan meningkat karena penerapan sistem SAP yang tepat dan pemahaman pemerintah daerah tentang akuntansi keuangan daerah.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

Dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang harus diikuti oleh pengendalian yang kuat. Pengendalian yang kuat dapat dilakukan dengan penguatan fungsi pengendalian, salah satunya pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai (Mardiasmo, 2010). SPI sebagai pengendali dan mengawasi penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk memastikan laporan tersebut akurat, tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai standar. Alhasil, diperkirakan bahwa penerapan SPI akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan.

Penggunaan teknologi informasi yang efektif diharapkan dapat mendukung proses pelaporan keuangan dan menghasilkan laporan yang dapat diandalkan dan akurat (Rahmawati et al., 2018). Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif mampu menciptakan informasi nilai aset yang sebenarnya dan dapat menghilangkan kecurangan pencatatan yang mungkin terjadi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, jelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan menjadi topik penelitian yang menarik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data aktual tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2019). Metode ini dipilih untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada pegawai bagian

akuntansi/keuangan di 17 dinas daerah Kabupaten Ponorogo. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas) dan untuk menguji pengaruh variabel independen dan dependen menggunakan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji statistik t (uji parsial)). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSAP	46	41	60	48,72	4,009
SPIP	46	49	65	57,17	3,093
PEMANFAATAN_TI	46	30	40	34,76	2,953
KLKPD	46	51	75	62,54	6,231
Valid N (listwise)	46				

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa nilai standar deviasi kurang dari nilai rerata dan menjauhi angka 0. Maka dapat diketahui bahwa data pada setiap variabel tersebut memiliki tingkat penyimpangan data yang kecil.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

**Uji Validitas**

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai	Indeks Validitas	r-	r-	Ket.
		Sig. (2- tailed)		hitung	tabel ( $\alpha =$ 5%)	
Penerapan Standar	X1.1	0,000	0,050	0,636	0,297	Valid
Akuntansi	X1.2	0,000	0,050	0,645	0,297	Valid
Pemerintahan (X1)	X1.3	0,000	0,050	0,633	0,297	Valid
	X1.4	0,005	0,050	0,405	0,297	Valid
	X1.5	0,000	0,050	0,715	0,297	Valid
	X1.6	0,000	0,050	0,688	0,297	Valid
	X1.7	0,000	0,050	0,616	0,297	Valid
	X1.8	0,000	0,050	0,614	0,297	Valid
	X1.9	0,000	0,050	0,663	0,297	Valid
	X1.10	0,000	0,050	0,541	0,297	Valid
	X1.11	0,000	0,050	0,631	0,297	Valid
	X1.12	0,001	0,050	0,456	0,297	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	X2.1	0,001	0,050	0,480	0,297	Valid
	X2.2	0,002	0,050	0,444	0,297	Valid
	X2.3	0,013	0,050	0,365	0,297	Valid
	X2.4	0,042	0,050	0,300	0,297	Valid
	X2.5	0,000	0,050	0,598	0,297	Valid
	X2.6	0,022	0,050	0,337	0,297	Valid
	X2.7	0,001	0,050	0,484	0,297	Valid
	X2.8	0,000	0,050	0,560	0,297	Valid
	X2.9	0,000	0,050	0,525	0,297	Valid
	X2.10	0,000	0,050	0,536	0,297	Valid

	X2.11	0,000	0,050	0,527	0,297	Valid
	X2.12	0,004	0,050	0,414	0,297	Valid
	X2.13	0,000	0,050	0,532	0,297	Valid
	X2.14	0,000	0,050	0,501	0,297	Valid
Pemanfaatan	X3.1	0,000	0,050	0,685	0,297	Valid
Teknologi Informasi	X3.2	0,000	0,050	0,734	0,297	Valid
(X3)	X3.3	0,000	0,050	0,772	0,297	Valid
	X3.4	0,000	0,050	0,583	0,297	Valid
	X3.5	0,000	0,050	0,622	0,297	Valid
	X3.6	0,000	0,050	0,809	0,297	Valid
	X3.7	0,000	0,050	0,714	0,297	Valid
	X3.8	0,000	0,050	0,542	0,297	Valid
	Y.1	0,000	0,050	0,709	0,297	Valid
Laporan Keuangan	Y.2	0,000	0,050	0,669	0,297	Valid
Pemerintah Daerah	Y.3	0,000	0,050	0,708	0,297	Valid
(Y)	Y.4	0,000	0,050	0,644	0,297	Valid
	Y.5	0,000	0,050	0,773	0,297	Valid
	Y.6	0,000	0,050	0,693	0,297	Valid
	Y.7	0,000	0,050	0,748	0,297	Valid
	Y.8	0,000	0,050	0,632	0,297	Valid
	Y.9	0,000	0,050	0,702	0,297	Valid
	Y.10	0,000	0,050	0,709	0,297	Valid
	Y.11	0,000	0,050	0,592	0,297	Valid
	Y.12	0,034	0,050	0,313	0,297	Valid
	Y.13	0,000	0,050	0,722	0,297	Valid
	Y.14	0,000	0,050	0,622	0,297	Valid
	Y.15	0,000	0,050	0,597	0,297	Valid

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada seluruh variabel tersebut sesuai ketentuan, yaitu nilai sig.  $< 0,05$  dan  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  (Ghozali, 2018). Variabel independen berjumlah 34 item dan variabel dependen yang berjumlah 15 item sudah sesuai dengan ketentuan, maka seluruh item pertanyaan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's alpha ( $\alpha$ )	Standar Reabilitas	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,840	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,718	0,70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,827	0,70	Reliabel
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,888	0,70	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa uji reabilitas dari semua variabel baik independen maupun dependen menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Sig.	Taraf Signifikansi	Keterangan
0.140	0.05	Distribusi Normal

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dan menjelaskan bahwa hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorv-Smirnov Test* memiliki nilai *Asymp. Sig (2-*

*tailed*) sebesar  $0,140 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah layak digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
PSAP	0,799	1,252	Tidak terjadi
SPIP	0,616	1,623	multikolinieritas
PEMANFAATAN_TI	0,658	1,520	Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dan menjelaskan bahwa nilai *Tolerance* dari semua variabel independen melebihi angka 0,10 dan hasil perhitungan dari nilai *VIF* juga menunjukkan nilai tidak melebihi angka 10. Artinya variabel tidak terjadi multikolinearitas dan telah memenuhi asumsi dari uji multikolinearitas untuk dilanjutkan pada uji selanjutnya.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
(Constant)		
PSAP	0,558	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPIP	0,943	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PEMANFAATAN_TI	0,825	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas membuktikan bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen adalah  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi dari uji heteroskedastisitas.

### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Nilai Koef.
(Constant)	-23,119
PSAP ( $X_1$ )	0,532
SPIP ( $X_2$ )	0,501
PEMANFAATAN_TI ( $X_3$ )	0,896

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan dan menjelaskan bahwa hasil analisis regresi linier berganda diatas memiliki persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -23,119 + 0,532X_1 + 0,501X_2 + 0,896X_3 + e$$

Berikut adalah penjelasan mengenai persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) menunjukkan nilai sebesar -23,119 artinya jika tidak ada variabel Penerapan SAP ( $X_1$ ), SPIP ( $X_2$ ) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ), maka nilai dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ) sebesar -23,119.
- Nilai koefisien regresi variabel Penerapan SAP ( $X_1$ ) memiliki nilai sebesar 0,532. Peningkatan satu satuan pada variabel PSAP ( $X_1$ ) sedangkan variabel lainnya tetap, maka kualitas LKPD ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,532.
- Nilai koefisien regresi variabel SPIP ( $X_2$ ) memiliki nilai sebesar 0,501. Peningkatan satu satuan pada variabel SPIP ( $X_2$ ) sedangkan variabel lainnya tetap, maka kualitas LKPD ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,501.
- Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) memiliki nilai sebesar 0,896. Peningkatan satu satuan pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) sedangkan variabel lainnya tetap, maka kualitas LKPD ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,896.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>R</i>	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,810	0,656	0,631

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besar kapabilitas variabel X dalam menjelaskan variabel Y, yaitu sebesar 0,631. Sehingga variabel penerapan SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi telah mampu menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 63,1%, sedangkan sisanya adalah 36,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model (tidak diteliti).

### Uji Statistik

#### Uji T (Uji Parsial)

**Tabel 9. Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial)**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai Sig.</b>	<b>Indeks Sig.</b>	<b>Status Hipotesis</b>
PSAP (X1)	0,002	0,05	Signifikan
SPIP (X2)	0,037	0,05	Signifikan
PEMANFAATAN TI (X3)	0,000	0,05	Signifikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerapan SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai kurang dari 0,05, berarti bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo. SAP telah diadopsi secara efektif untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Semakin baik penggunaan dan pelaksanaan SAP maka akan semakin baik pula pelaporan keuangannya. Sebaliknya, penerapan SAP yang tidak tepat akan berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak sesuai dan tidak relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan digunakan untuk memeriksa keadaan keuangan, menilai kemajuan dan efisiensi organisasi pelapor, mengukur mutu sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam melangsungkan kegiatan operasional, dan meninjau tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan (Khoirunisa & Ahmad, 2022).

Sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. LKPD Kabupaten Ponorogo telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga dapat memenuhi kualitas yang diinginkan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP yang dinyatakan dalam bentuk PSAP nomor 1-12 yang memuat pernyataan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kategori penyusunan yang baik dan benar. Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan penerapan PSAP yang memuat mengenai penyajian laporan keuangan, LRA, laporan arus kas, CaLK, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi kontruksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, laporan keuangan konsolidasian dan laporan operasional dengan baik, sehingga laporan yang dihasilkan mampu digunakan sebagai pengambil keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian oleh Putri & Agustiawan, (2020) menjelaskan bahwa kualitas LKPD yang dihasilkan akan semakin meningkat jika SAP digunakan dan diterapkan dengan

baik. Penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pedoman SAP akan memudahkan terselenggaranya pemerintahan yang terstruktur, sehingga adanya pedoman SAP dapat menghasilkan laporan keuangan bermutu dan akuntabel. Dikaitkan dengan teori *stewardship*, pemerintah sebagai *steward* telah mampu mengelola anggaran dengan sebaik mungkin untuk membantu kepentingan rakyat (*principal*). Peran pemerintah disini memperhatikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan penerapan SAP, yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada publik.

### **Pengaruh SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa penerapan SPIP mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo secara signifikan. Artinya, semakin baik penerapan SPIP, maka akan diikuti semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan. Penelitian oleh Armyanti & Handayani, (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan berguna untuk mencapai efektivitas, efisiensi, akuntabel, transparan dan sesuai dengan pedoman untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan bahwa pengendalian pada lingkup pemerintahan Kabupaten Ponorogo, khususnya dinas daerah harus berkaitan dengan indikator atau unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas/kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap pengendalian intern. Lingkungan pengendalian pada dinas daerah Kabupaten Ponorogo telah ditenggakkan melalui kegiatan-kegiatan yang mampu mewujudkan manajemen yang sehat, seperti revidasi kinerja, pembinaan SDM, pengendalian pengelolaan sistem, dan akuntabilitas mengenai sumber daya. Penilaian risiko dilakukan dengan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi dan mengancam dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian dilakukan sebagai arahan untuk meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi dalam proses penilaian, kegiatan ini berisi mengenai

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

kebijakan maupun prosedur. Informasi dan komunikasi digunakan sebagai identifikasi dan catatan mengenai operasional dan keuangan pada instansi, informasi akan dikomunikasikan pada pimpinan agar terjalin hubungan yang efektif dan pelaksanaan tugas yang efisien. Selanjutnya dilakukan pemantauan untuk menilai kualitas kinerja secara berkala dan segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini, dinas daerah Kabupaten Ponorogo telah mampu menyelenggarakan sistem pengendalian dengan baik sehingga hasil penelitian tersebut berpengaruh. Sejalan dengan teori *stewardship*, yaitu pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan rakyat, sehingga tindakan pemerintah sebagai *steward* harus mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan penerapan SPIP untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Sebagai *steward*, seluruh dinas daerah telah melakukan pengendalian atas setiap pencatatan, ketepatan, proses dan prosedur terkait penyusunan laporan keuangan. Begitupun dengan rakyat sebagai *principal* akan percaya bahwa pemerintah memiliki kemampuan dalam memberikan layanan dan pertanggungjawaban yang baik dan sesuai aturan perundangan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo secara signifikan. Hal ini dikarenakan dinas daerah di Kabupaten Ponorogo telah memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal pada saat pencatatan, pengolahan dan penyajian laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan meningkat dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

Dalam penyelenggaraan SIKD ini, Kabupaten Ponorogo telah melakukan penyajian informasi, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan melalui situs resmi pemerintah daerah. Seluruh dinas di Kabupaten Ponorogo telah memiliki berbagai alat dan unsur lain yang digunakan untuk menunjang kerja dalam pemanfaatan teknologi informasi, diantaranya adalah tersedianya alat komputer dan

jaringan internet, proses akuntansi yang telah terkomputerisasi dengan ketersediaan *software*, yaitu SIPD, terintegrasinya sistem informasi akuntansi, serta pemeliharaan peralatan dan pendataan peralatan yang telah rusak/usang.

Penelitian oleh Laitera et al., (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan keuangan daerah akan membantu peningkatan proses transaksi keuangan dan data lainnya, keakuratan anggaran, serta penyajian laporan lebih tepat sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam pencatatan dan efisien dalam proses penyusunan laporan keuangan, dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dikaitkan dengan teori *stewardship*, pemanfaatan ini mengarahkan pada kemampuan pemimpin (*steward*) dalam mengefektifkan teknologi yang ada untuk mendukung proses pelaporan dan pengambilan keputusan guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo. Semakin baik penerapan SAP, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. SPIP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo. Penerapan SPIP pada pemerintah Kabupaten Ponorogo telah diimplementasikan dengan baik, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh paling dominan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo telah dengan baik memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pada saat pengumpulan kuesioner masih banyak responden yang tidak menjawab secara lengkap mengenai

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Ade Tiya Indriyani<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>

kuesioner yang diajukan. Sehingga peneliti perlu melakukan pendampingan pada setiap responden saat melakukan pengisian kuesioner agar responden mengisi jawaban secara lengkap dan tepat. Serta, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang menjelaskan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Armyanti, S. N., & Handayani, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opd Kabupaten Sidoarjo. *E-Jurnal Akuntansi*, 2183. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P20>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Hamzah, A., & Rizky, M. (2022). Determinant Analysis Of Company Debt Policy With Vector Error Correction Model Approach. *Global Financial Accounting Journal*, 06(01), 154–169.
- Hamzah, A., & Suhardi, D. D. (2019). Tingkat Literasi Keuangan Dan Financial Technology Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, 5(2), 97–108.
- Hamzah, A., & Suhendar, D. (2020). Financial Inclusion Model On The Development Of Batik Smes In Cirebon Regenvy. *Jurnal Minds : Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.24252/Minds.V7i2.16512>
- Indonesia, B. P. K. R. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indonesia, R. (2010a). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indonesia, R. (2010b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

- Khoirunisa, N., & Ahmad, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 82–91. <https://doi.org/10.25047/Asersi.V2i1.3189>
- Laitera, F., Ahuluheluw, N., & Laitupa, M. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya ). 1(April), 74–80.
- Nurhayati, E., Hamzah, A., & Nugraha, H. (2021). Stock Return Determinants In Indonesia. *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 45–56.
- Nurhayati, E., Hamzah, A., Suhendar, D., & Sari, D. F. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 354–376.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 22–34.
- Ponorogo, T. (2020). *Ponorogo Raih Penghargaan WTP 8 Kali Berturut-Turut*. Jatim.Bpk.Go.Id.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Putri, N. R., & Agustiawan. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Kampar). *Muhammadiyah Riau Accounting And Business Journal*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.55356/Sak.V1i1.10>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Ekonomi, Jurnal Soedirman, Universitas Jenderal Informasi, Teknologi*, 20(2005), 8–17.
- Sugiono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. *Bandung: Alfabeta*.